

**DISKRESI OLEH PIHAK KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN
ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM**

(Studi Terhadap Anak yang Melakukan Penganiayaan Ringan di Polres Kota Batu)

ARTIKEL ILMIAH

DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI SEBAGAIAN SYARAT-SYARAT

UNTUK MEMPEROLEH GELAR KESARJANAAN

DALAM ILMU HUKUM

Oleh:

NOVIA RATIH PUSPITA DEWI

NIM:0910110199

KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NASIONAL

UNIVERSITAS BARWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2013

LEMBAR PERSETUJUAN

**Judul Artikel Ilmiah : DISKRESI OLEH PIHAK KEPOLISIAN DALAM
PENANGANAN ANAK YANG BERKONFLIK
DENGAN HUKUM (Studi Terhadap Anak yang
Melakukan Penganiayaan Ringan di Polres Kota
Batu)**

Identitas Penulis :

**a. Nama : Novia Ratih Puspita Dewi
b. NIM : 0910110199**

Konsentrasi : Hukum Pidana

Jangka Waktu Penelitian : 6 Bulan

Disetujui Pada Tanggal : Mei 2013

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Prof. Masruchin Ruba'I S.H., M.S.

Paham Triyoso S.H., M. Hum

NIP. 19760429 200212 2 001

NIP. 19540517 198203 1 003

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Pidana

Eny Harjati S.H., M.H.

NIP. 19590406 198601 2 001

DISKRESI OLEH PIHAK KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM

(Studi Terhadap Anak yang Melakukan Penganiayaan Ringan di Polres Kota Batu)

Prof. Masruchin Ruba'I SH.MS., Paham Triyoso SH.M.HUM.

OLEH: NOVIA RATIH PUSPITA DEWI¹

ABSTRAKSI

Artikel ilmiah ini membahas tentang diskresi Oleh Pihak Kepolisian dalam Penanganan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum. Hal ini didasari semakin meningkatnya jumlah pelaku anak yang harus berhadapan dengan hukum positif Indonesia. Permasalahan yang diangkat adalah untuk mengetahui pertimbangan pihak Kepolisian Polres Kota Batu dalam menerapkan aturan diskresi terhadap anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan dan untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian Polres Kota Batu dalam menerapkan aturan Diskresi terhadap anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis.

Dari hasil analisis yang telah dilakukan maka dapat diketahui bahwa pihak kepolisian memiliki pertimbangan khusus dalam menerapkan diskresi terhadap suatu kasus antara lain pelaku masih dibawah umur, tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana ringan, kerugian yang dialami oleh korban tidak membahayakan nyawa, keresahan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh anak, persetujuan korban atas penerapan diskresi, kesediaan pelaku dan keluarga pelaku untuk menepati perjanjian dan syarat diskresi. Kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian polres kota batu yakni, anggapan negatif masyarakat terhadap pihak Kepolisian, Rendahnya pengetahuan hukum masyarakat terutama pada kebijakan Diskresi, penolakan pemberlakuan diskresi oleh korban dan keluarga korban. Upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Polres Kota Batu untuk mengatasi kendala-kendala tersebut adalah dengan melakukan pembangunan citra kepolisian sebagai pengayom masyarakat, melakukan penyuluhan hukum pada masyarakat, bagi korban dan keluarga korban yang menolak diberlakukannya diskresi diberi pemahaman dan pengertian atas kebijakan diskresi.

Kata kunci: Diskresi, Anak, Tindak Pidana Anak

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang

ABSTRAKSI

This scientific article discusses about Discretion by Police in handling child who have conflict with law. This research based on fact many child to stand opposite with Indonesian positive law. Issues raised is to know police Batu City consideration in apply discretion rule to child who have conflict with law because committing a crime like persecution, and to identify constraints faced by the police Batu City in persecution. This research uses empirical research to the sociological juridical approach.

From the analysis that has been done, it can be seen that the police have discretion in applying discretion on a case such as the perpetrator was a minor, an offense that carried a misdemeanor, the losses suffered by the victim is not life threatening, anxiety caused by criminal offenses committed by a child, the victim's consent for the implementation of discretion, the willingness of the offender and the offender to keep his family and deal discretion conditions. The constraints faced by the police Batu City is the society's negative perception towards the police, lack of knowledge of the legal community, especially the policy of discretion, denial of enforcement discretion by the victim and their families. The efforts made by the police Batu to overcome these obstacles is to undertake the construction of the image of the police as a public protector, conduct legal education in the community, for the victims and families of victims who resist the implementation of discretion given insight and understanding of policy discretion.

Keywords: Discretion, Child, Child Crime

A. PENDAHULUAN

Tidak dapat dipungkiri anak kerap berkonflik dengan lingkungan sosialnya, terlebih anak masih memiliki jiwa yang labil. Tidak jarang pula terdapat anak yang berkonflik dengan hukum, diakibatkan perbuatan mereka yang dianggap salah atau anti sosial oleh masyarakat. Anak yang berhadapan dengan hukum kerap di kaitkan dengan *Juvenile delinquance* atau kenakalan anak, istilah *Juvenile deliquance* muncul di forum yang ada pada Badan Peradilan di Amerika Serikat dalam rangka membentuk suatu Undang-undang bagi anak yang memiliki masalah di Amerika Serikat.

Juvenile berarti adalah anak-anak, anak muda yang memiliki ciri atau karakteristik sifat-sifat khas masa remaja. *Deliquance* berarti berbuat suatu hal yang salah, terabaikan/diabaikan/mengabaikan, yang kemudian pada perkembangannya di perluas menjadi jahat, anti sosial, kriminal, pelanggar aturan masyarakat, perusak, pengacau, dan lain-lain².

Anak kerap terlibat suatu tindak pidana, salah satunya adalah penganiayaan. Penganiayaan adalah salah satu bentuk kejahatan terhadap nyawa orang lain dalam KUHP dapat dibedakan atas 2 dasar yaitu : (1) atas dasar unsur kesalahannya dan (2) atas dasar obyeknya yaitu nyawa³. Penganiayaan adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit, atau luka. Penganiayaan juga dapat diartikan sebagai sengaja merusak kesehatan seseorang⁴. Penganiayaan adalah sebuah bentuk serangan yang tidak berakibat kematian pada korban, penganiayaan dapat dilakukan oleh seorang anak yang merasa terganggu keadaan atau kehormatannya.

Penyelesaian kasus anak yang melalui jalur pengadilan adalah cara yang dianggap membahayakan perkembangan jiwa anak, di mana terdapat ketakutan sebagian orang bahwa penyelesaian melalui pengadilan akan

² Wagianti soetodjo, *Hukum Pidana Anak, refika aditama*, Bandung ,2005, hlm. 8-9.

³ Adami Chazawi, *Kejahatan terhadap tubuh dan nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 55.

⁴ R. Soesilo, *UU Hukum Pidana Beserta Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Polieta, Bogor, hlm.211.

membuat anak mengalami beban mental dan sosial yang teramat berat. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada terdapat kesempatan untuk anak yang berhadapan dengan hukum menyelesaikan kasusnya di luar persidangan atau hukum yang berlaku.

Diskresi adalah wewenang dari aparat penegak hukum yang menangani kasus tindak pidana untuk mengambil tindakan meneruskan perkara atau menghentikan perkara, mengambil tindakan tertentu sesuai dengan kebijakannya. Kewenangan aparat penegak hukum yang disebut *discretion* atau 'diskresi', didasarkan pada Pasal 18 ayat (1) Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.

Diskresi sebagai salah satu jalan dalam menangani kasus anak adalah salah satu kewenangan dari pihak kepolisian dalam menggunakan kewenangan diskresionernya. Diskresi diharapkan dapat meminimalisir angka anak yang harus mengalami penahanan dan segala bentuk aturan dalam hukum pidana positif. Maka dengan adanya permasalahan tersebut penulis melakukan penelitian di Polres Kota Batu, dimana hasil penelitian tersebut dituangkan dalam artikel yang berjudul **“DISKRESI OLEH PIHAK KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM (Studi Terhadap Anak yang Melakukan Penganiayaan Ringan di Polres Kota Batu)”**.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Apa pertimbangan pihak Kepolisian dalam memberikan diskresi terhadap pelaku kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak?
2. Apa hambatan dalam penerapan diskresi terhadap kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak?

C. METODE PENELITIAN

Artikel ini disusun dari penelitian yang dilakukan penulis, dimana Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris yakni penelitian terhadap fakta empiris yang diperoleh berdasarkan observasi atau pengalaman.⁵ Digunakannya tipe penelitian hukum empiris karena tipe ini menelaah persoalan mengenai aturan diskresi yang tertuang dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Metode pendekatan yang digunakan yaitu dengan penelitian secara langsung terhadap tempat berlangsungnya studi dengan pendekatan yuridis sosiologis karena hendak mengetahui penerapan diskresi oleh pihak kepolisian dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan pihak kepolisian Polres Kota Batu dalam menerapkan aturan diskresi terhadap anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan. Selain itu penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian Polres Kota Batu dalam menerapkan aturan diskresi terhadap anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan.

Di dalam penelitian ini terdapat 2 jenis data yaitu,:

- a. Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari lapangan⁶. Sumber data primer mengacu pada hasil wawancara dengan pihak kepolisian, dimana wawancara tersebut ditujukan untuk memberikan informasi bagi penulis terkait faktor yang melatar belakangi pihak kepolisian memberikan diskresi terhadap tindak pidana yang dilakukan anak.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari kepustakaan seperti buku-buku, tulisan ilmiah, Undang-Undang, majalah, atau media

⁵Hexana Sri Lestari, *Metodologi Penelitian: Riset Ilmiah dan Proses Riset*, Pusat Pengembangan bahan Ajar- UMB, Jakarta, 2008, hal. 5

⁶ M.Iqbal Hasan, *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Remaja Karya, Bandung, 1999, hlm.35.

lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas⁷. Sumber data sekunder mengacu pada hasil penelusuran dokumen milik Satuan Reskrim Polres Batu dan penelusuran kepustakaan yang terkait dengan diskresi pada kasus anak yang melakukan penganiayaan.

Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis yaitu mengungkapkan suatu masalah atau keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya dengan menyandarkan kepada logika dalam bentuk uraian kalimat⁸.

D. PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kota Batu adalah salah satu Kota yang terletak di Propinsi Jawa Timur, Kota Batu secara resmi menjadi Kota administratif pada 7 Oktober 2002. Perkembangan pesat yang terjadi pada Kota Batu juga berdampak pada aspek-aspek pendukung Kota Batu dimana Kota batu saat ini terkenal sebagai tempat wisata juga berdampak pada pembangunan dan perekonomian masyarakat.

Kota Batu terletak –Km dari Kota Malang, Kota Batu terletak dalam koordinat geografis 110 31' 14 " – 110 36' 40" Bujur Timur dan 77 36' 38" – 008 01' 57" Lintang Selatan dengan kelembaban suhu rata-rata 18⁰ C sampai dengan 30⁰ C pada ketinggian 500 sampai dengan 1100 M diatas permukaan laut. Kota Batu sendiri memiliki 3 kecamatan dan 5 kelurahan, berdasarkan sensus penduduk Jumlah penduduk wilayah Batu sejumlah 188.429 Jiwa.

⁷ Roni Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 107.

⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, hlm. 64.

Polres Kota Batu adalah salah satu institusi penegak hukum yang berada dibawah Kepolisian Republik Indonesia, Polres adalah bagian pelaksana utama kewilayahan Polda berkedudukan di bawah Kapolda. Polres Kota Batu berlokasi di Jl. Hasanudin No.1 Batu, dimana Polres Kota Batu bersebelahan dengan gedung Dewan Perwakilan Daerah Kota Batu. Polres Kota Batu berdiri diatas tanah seluas 17.003 m² dan bangunan seluas 12.098 m² yang bersertifikat nomor 00002 tanggal 10 Maret 2005 atas nama Departemen Pertahanan RI dengan status hak pakai.

Polsek Batu sebagai cikal bakal berdirinya Polres Batu sebelumnya berada dalam struktur Organisasi Polres Malang yang berada di wilayah Kec. Kepanjen. Pada bulan Maret tahun 2003 berdasarkan telaah staf di usulkan menjadi Polres Persiapan Batu yang direncanakan siap diresmikan dalam kurun waktu sepuluh bulan sehingga pada Bulan Desember 2003 peningkatan Polres Persiapan Batu menjadi Polres Devinitif dengan status Polres type B 2 Polda Jatim dan diresmikan tanggal 21 Desember 2003, Polres Kota Batu diresmikan oleh Kapolri Jenderal Polisi Drs. Da'i Bachtiar, S.H.

Polres Kota Batu saat ini di pimpin oleh seorang Kapolres yakni Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Muhammad Sumartono, SH. Polres Kota Batu saat ini memiliki 3 (Tiga) Kepolisian Sektor yang menjadi tanggung jawabnya. Jumlah riil personel Polres Batu saat ini masih sangat jauh dari memadai dimana dari kebutuhan yang sesuai dengan Peraturan Kapolri nomor 23 tahun 2010 tanggal 30 September 2010. Jumlah anggota Polri dan PNS keseluruhan Polres Kota Batu saat ini hanya 414 orang dari kebutuhan sebenarnya yaitu 650 orang (sesuai Perkap no 23 tahun 2010).

Unit perlindungan perempuan dan anak atau yang lebih dikenal dengan UPPA adalah bagian dari satreskrim yang dipimpin oleh seorang Kanit, saat ini UPPA Polres Kota Batu dipimpin oleh AIPTU Endang Iriani dalam menjalankan tugasnya UPPA memiliki 4 (Empat) orang Penyidik. Penyidik UPPA Polres Kota Batu terdiri dari satu orang Polwan dan dua orang Polki.

2. Pertimbangan Pihak Kepolisian dalam Memberikan Diskresi Terhadap Pelaku Kasus Penganiayaan yang Dilakukan Oleh Anak

Kepolisian adalah aparat penegak hukum yang langsung bersentuhan dengan anak-anak yang berhadapan dengan hukum, dalam menjalankan tugasnya pihak kepolisian memiliki unit khusus untuk menangani anak-anak. UPPA yang merupakan salah satu unit khusus yang berada dalam struktur organisasi Reskrim dimana UPPA memiliki fungsi dan tugas tersendiri, dimana kasus kejahatan yang ditangani oleh UPPA berkisar pada wanita dan anak-anak.

Dalam menjalankan proses diskresi yang tidak dapat digunakan secara sembarangan wewenang tersebut oleh pihak kepolisian, dimana diskresi harus digunakan dengan alasan yang rasional dan logis, namun tetap selektif dan proposional. Berkaitan dengan hal tersebut UPPA Polres Kota Batu sangat hati-hati dalam melakukan penerapan wewenang diskresi, dimana penyidik harus terus selektif dan dapat mempertanggungjawabkan keputusannya⁹.

Beberapa syarat yang harus terpenuhi sebagai syarat utama sebuah kasus dapat di diskresi oleh penyidik UPPA Polres Kota Batu adalah¹⁰:

- a. Pelaku masih di bawah umur, ketentuan pelaku dibawah umur mengikuti pada Keputusan Mahkamah Agung yakni usia 12 (dua belas) tahun hingga 18 (delapan belas) tahun.
- b. Kasus yang dapat di diskresi adalah kasus ringan, kasus yang dapat di diskresi adalah kasus ringan namun kasus berat tidak dapat di diskresi walau pelaku masih di bawah umur.

⁹ Wawancara dengan Aiptu Endang Iriani, Kanit UPPA Polres Kota Batu, 7 Desember 2012

¹⁰ Wawancara dengan Aiptu Endang Iriani Kanit UPPA Polres Kota Batu, diolah, 22 November 2012

- c. Kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana anak, kerugian ini bila bersifat keadaan dan tidak berhubungan dengan tubuh dan nyawa seseorang maka lebih mendesak untuk di dahulukan.
- d. Keresahan masyarakat yang disebabkan oleh perbuatan anak, tingkat keresahan yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku juga diperhatikan oleh penyidik UPPA Polres Kota Batu.
- e. Persetujuan korban dan keluarga korban, persetujuan korban adalah hal utama dalam tercapainya diskresi dimana pihak kepolisian berperan aktif dalam mendapat persetujuan pihak keluarga korban.
- f. Kesiediaan pelaku dan keluarga pelaku, bila pelaku bersedia berdamai dan menepati permintaan pihak korban maka diskresi dapat segera di jalankan.
- g. Diskresi diterapkan secara situasional, yakni pihak kepolisian melihat pada situasi dan kondisi pada pelaku, korban, maupun masyarakat yang memungkinkan diterapkan diskresi.

3. Faktor Penghambat Dalam Penerapan Diskresi Terhadap Kasus Penganiayaan yang Dilakukan Oleh Anak

UPPA dalam menyelesaikan perkara tindak pidana penganiayaan ringan selalu mengedepankan proses diskresi, dimana proses diskresi diterapkan dengan mengikuti kriteria yang telah ditetapkan TR dan berdasar keyakinan penyidik UPPA. Dalam proses penerapan diskresi tidak selalu dapat berjalan dengan baik, masih ditemui kendala yang menghambat kinerja penyidik UPPA Polres Kota Batu. Adapun beberapa kendala yang menghambat penerapan diskresi untuk kasus penganiayaan ringan yang dilakukan oleh anak adalah sebagai berikut:

- 1. Anggapan negatif masyarakat terhadap kinerja pihak kepolisian, dimana bila penyidik hendak menerapkan diskresi terhadap suatu kasus terdapat pihak-pihak yang menganggap bahwa diskresi hanya

jalan pihak kepolisian untuk mendapat imbalan dengan tidak memproses kasus.

2. Pihak keluarga korban yang tidak menyetujui diterapkannya diskresi, dimana keluarga korban selalu meminta pihak kepolisian untuk memenjarakan atau menghukum anak pelaku penganiayaan dan tidak menyetujui diskresi sebagai upaya terbaik bagi anak baik pelaku maupun korban.

Diskresi dalam penerapan dan pelaksanaannya masih memiliki hambatan. Untuk mengatasi hambatan yang muncul pihak kepolisian telah melakukan upaya-upaya agar diskresi dapat dilaksanakan, diantaranya:

1. Pihak kepolisian saat ini terus membangun citra positif agar pandangan negatif masyarakat terhadap kepolisian dapat dihindari. Selama ini dalam pandangan masyarakat kepolisian erat kaitannya dengan suap dan nepotisme, sehingga pihak kepolisian saat ini membangun citra sebagai pengayom masyarakat. Pihak kepolisian mulai membangun citra dengan melakukan pelayanan masyarakat dengan baik dan ramah dan melakukan patroli rutin dipemukiman warga.
2. Keluarga korban yang tidak setuju untuk diterapkan diskresi harus diberi pemahaman, pihak penyidik UPPA selalu memberi pemahaman terhadap korban atau keluarga atas tindakan yang diterapkan. Pihak kepolisian dapat dibantu oleh Lembaga Swadaya Masyarakat, Kepala Desa, Kepala Sekolah, ataupun tokoh masyarakat lain.

E. PENUTUP

1. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah diangkat dalam penelitian ini, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan diantaranya:

1. Pertimbangan penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Kota Batu dalam

menerapkan diskresi dalam kasus anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan ringan, antara lain:

- a. Pelaku masih di bawah umur, yakni pelaku anak yang telah berumur 12 (dua belas) hingga 18 (delapan belas) tahun;
- b. Tindak Pidana yang dilakukan tergolong sebagai tindak pidana ringan;
- c. Kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku, dimana kerugian yang timbul tidak membahayakan nyawa korban.;
- d. Keresahan yang timbul dimasyarakat akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku;
- e. Persetujuan dari korban dan keluarganya atas proses diskresi yang diterapkan oleh pihak Kepolisian;
- f. Kesiediaan pelaku dan keluarga pelaku untuk menepati perjanjian atau syarat diskresi, dengan pengawasan dari pihak kepolisian.
- g. Diskresi diterapkan secara situasional, yakni pihak kepolisian melihat pada situasi dan kondisi pelaku, korban, maupun masyarakat yang memungkinkan diterapkan diskresi.

2. Kendala yang dihadapi oleh penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Kota Batu dalam menjalankan diskresi terhadap anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan ringan, antara lain:

- a. Anggapan negatif masyarakat terhadap kinerja pihak kepolisian bila menerapkan diskresi;
- b. Pihak keluarga korban yang menolak kasus untuk di diskresi.

3. Upaya yang dilakukan oleh penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak untuk mengatasi hambatan dalam melaksanakan diskresi terhadap kasus penganiayaan ringan yang dilakukan oleh anak, antara lain:

- a. Pihak Polres Kota Batu saat ini terus membangun citra positif sebagai pengayom masyarakat. Pihak kepolisian mulai membangun citra dengan melakukan pelayanan masyarakat dengan baik dan ramah.
- b. Penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak memberi pemahaman terhadap korban dan keluarga korban atas tindakan diskresi yang diterapkan, agar tercipta pengertian atas diskresi dengan mengedepankan

kepentingan terbaik bagi anak tanpa mengesampingkan keadilan untuk korban.

2. SARAN

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang terdapat dalam penelitian ini, maka penulis memiliki saran-saran sebagai berikut:

- a. Diharapkan terwujud kepercayaan terhadap kinerja kepolisian yang mengemban tugas penyelidikan dan penyidikan oleh pihak-pihak terkait dan seluruh lapisan masyarakat.
- b. Dikarenakan begitu kompleksnya hukum positif Indonesia yang berlaku, sebaiknya pihak kepolisian bekerjasama dengan kementrian dan pihak-pihak terkait untuk terus melakukan sosialisasi pada masyarakat luas akan hukum-hukum yang berlaku di Indonesia. Diskresi adalah sebuah kebijakan yang masih asing dan tidak banyak diketahui oleh masyarakat Indonesia, dimana diperlukan sebuah pengenalan pada masyarakat atas diskresi sebagai sebuah metoda hukum alternatif.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.

Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, refika aditama, Bandung, 2005.

R, Soesilo, *UU Hukum Pidana Beserta Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Polieta, Bogor.

Hexana Sri Lestari, *Metodologi Penelitian: Riset Ilmiah dan Proses Riset*, Pusat Pengembangan bahan Ajar- UMB, Jakarta, 2008.

M. Iqbal Hasan, *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Remaja Karya, Bandung, 1999.

Roni Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1990.

Undang-Undang:

Undang-undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia